BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa tidak satu pun negara di dunia ini yang mampu melepaskan diri dari ketergantungan satu sama lain terlebih dengan situasi internasional. Keikutsertaan suatu negara bangsa terhadap situasi internasional sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi nasional negara yang bersangkutan.

Disini dapat terlihat, bahwa suatu pola hubungan antar anggota satuan masyarakat lazimnya disebut hubungan internasional, yang merupakan bentuk interaksi satu sama lain anggota satuan masyarakat yang berbeda baik yang bertindak atas nama negara maupun tidak.[1]

Dinamika politik internasional dalam suatu pola hubungan yang menjalin setiap aktor bangsa tidaklah selalu diwarnai dengan hal-hal yang harmonis. Hal tersebut terjadi karena setiap negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, dan mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda untuk mereka perjuangkan. Keharmonisan akan timbul jika kepentingan nasional suatu bangsa saling melengkapi kepentingan dari negara lain. Sebaliknya, jika dalam kepentingan itu terdapat perbenturan dan pertentangan satu sama lain, maka suatu konflik dan persaingan, bahkan konfrontasi bersenjata bukan tidak mungkin akan

---

[1] K.J, Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa,* Wawan Juanda, Binacipta, dalam

terjadi. Dengan demikian kondisi interaksi dalam hubungan internasional dapat berupa kerjasama dan dapat pula bersifat kompetisi.

Ironisnya, interaksi politik internasional mereka justru didominasi oleh hubungan antar satuan negara berdaulat penuh, sehingga konflik kepentingan antar negara akan tetap merupakan salah satu ciri utama dari apa yang dapat disebut sebagai masyarakat bangsa-bangsa yang anarkis. Oleh sebab itu masalah perdamaian dan stabilitas yang fundamental adalah bagaimana bangsa-bangsa dapat menyelesaikan atau sekurang-kurangnya mengelola konflik-konflik antar mereka melalui cara-cara damai sehingga dapat mencegah perkembangan konflik-konflik tertentu menjadi konflik bersenjata.[2]

Di samping itu hubungan internasional tidak hanya mencakup hubungan atau keadaan yang bersifat damai saja, melainkan juga yang bersifat bermusuhan, bahkan juga dalam keadaan perang. Dalam praktek stuudi hubungan internasional menunjukkan bahwa suatu peristiwa menjadi masalah internasional atau global justru kalau dia merupakan konflik, baik yang bersenjata maupun yang tidak disertai dengan tindakan kekerasan.[3]

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konflik dan persaingan antar negara di lingkungan internasional merupakan salah satu ciri dalam interaksi politik internasional. Dengan demikian pula, studi hubungan internasional yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan konflik internasional akan tetap diperlukan, mengingat persaingan dan konflik itu tidak akan pernah dapat dihilangkan, baik yang dilakukan melalui kekuatan bersenjata maupun tidak.

---

[2] J. Soedjati Djiwandono, *"Amerika Serikat dan Hubungan Timur-Barat"*, Analisa CSIS hal. 132
[3] Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional – Kerangka Studi Analitis*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal 9.

Berkaca dari kenyataan diatas disadari bahwa politik luar negeri bukan hanya kepanjangan dari politik dalam negeri suatu negara, tetapi juga merupakan suatu reaksi terhadap tantangan berat yang disebabkan oleh perkembangan tatanan dan dinamika internasional di mana negara saling berinteraksi. Pemahaman politik luar negeri seperti ini semakin signifikan dirasakan dewasa ini, ketika hubungan internasional mengalami perubahan dan perkembangan yang begitu cepat, ditandai dengan beragamnya isu dan aktor yang berperan.

Munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional yang berkaitan erat dalam menentukan arah sebuah kebijakan politik global, salah satunya yaitu kehadiran Organisasi Internasional yang telah merubah wajah dan warna percaturan politik global.

Hampir seluruh negara di dunia ini tergabung dan menjadi anggota berbagai organisasi internasional, karena mereka memandang bergabung dengan organisasi internasional tersebut akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi kepentingan nasional sebuah negara. Namun apa yang terjadi dengan negara Rusia, sebuah fenomena yang langka dan anomali terutama dalam percaturan politik global.

Rusia membuat sebuah kebijakan yang mengejutkan dipertengahan tahun 2007, melalui Presidennya Vladimir Putin yang menyatakan bahwa Rusia keluar dari keanggotaan *The Treaty on Conventional Armed Forces in Europe* (CFE), ia menyatakan ini ditengah-tengah konferensi tahunan mengenai kebijakan keamanan di Muenchen, Jerman, 10 Februari 2007 lalu yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan rencana Amerika Serikat untuk menempatkan tameng perisai

jelas merupakan ancaman langsung bagi keamanan Rusia. Ini adalah sebuah kebijakan yang sangat berani diambil oleh sebuah negara, karena hampir dipastikan semua negara ingin memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Salah satu jalan menuju hal tersebut, yakni bergabung menjadi anggota yang berpengaruh di organisasi internasional yang bergengsi, tentu hal ini akan menaikkan posisi tawar negara bersangkutan.

Isu ini sangat menarik untuk dikaji karena beberapa alasan. Yang pertama, isu ini melibatkan aktor-aktor yang paling kuat di dalam sistem internasional, di mana struktur interaksi di antara keduanya membentuk pola interaksi di antara seluruh negara lain di dalam sistem. Yang kedua, isu ini menggambarkan masih sangat relevannya isu keamanan tradisional yang untuk beberapa waktu seakan tenggelam seiring dengan berkembangnya isu-isu keamanan baru seperti keamanan ekonomi, sosial-budaya, individu, dan lingkungan. Yang ketiga, isu ini dapat menjadi contoh yang baik untuk memperlihatkan proses re-sekuritisasi isu yang telah menjadi permasalahan klasik dalam studi keamanan internasional, yang juga telah menuai berbagai kritik tajam dan kontroversi, yaitu persenjataan konvensional maupun senjata nuklir. Yang terakhir, isu ini merepresentasikan isu keamanan tradisional yang relevan sebagai isu keamanan global karena sifat dan potensi dampak yang terkandung di dalamnya.

Melihat fenomena inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai permasalahan Rusia di CFE yang ditandai dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri. Permasalahan tersebut penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi yaitu: **Pengaruh Keputusan Rusia**

Keluar dari CFE Pasca ratifikasi tahun 1999 Terhadap Stabilitas Keamanan Eropa

B. Tujuan Penulisan

Suatu penulisan ilmiah bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang fenomena tertentu yang terjadi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mendapatkan bukti dan data atas diambilnya kebijakan pemerintah Rusia keluar dari CFE pada tahun 2007 serta mendeskripsikannya.
2. Menganalisa faktor-faktor penyebab Rusia keluar dari CFE pada tahun 2007, pasca ratifikasi pada tahun 1999.
3. Mengkaji pokok permasalahan dengan teori yang relevan serta membuktikan hipotesa dengan data dan bukti-bukti yang ada.

C. Latar Belakang Permasalahan :

Salah satu negara yang makin menunjukkan kemajuannya saat ini adalah Rusia. Keterpurukan ekonomi pasca-Soviet kini sudah berada di belakang mereka. Dengan efektif industri energi dinasionalisasi dan dikelola oleh BUMN yang dijadikan ujung tombak perbaikan ekonomi. Rusia tak lagi menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF), di ambang keanggotaan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan siap bergabung dengan kelompok elite negara ekonomi terdepan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dan sejak 2005 Rusia mengalahkan Amerika Serikat menjadi produser minyak terbesar kedua sesudah Arab Saudi. Pendapatan dari industri minyak mereka mencapai 679 juta dolar sehari. Banyak negara Eropa Barat bergantung

Rusia merupakan produser gas terbesar di dunia yang menyumbang pada cadangan devisa sebesar 315 miliar dolar, naik dari sekitar 12 milliar pada 1999.[4]

Dengan kepemilikan cadangan minyak dan gas dalam jumlah yang sangat besar disertai naiknya harga minyak di pasar dunia, Rusia mampu memperbaiki perekonomian dalam negeri. Terbukti dengan dibayar lunasnya hutang-hutang luar negeri terutama dari IMF sebelum jatuh tempo yang disusul keluar dari dari IMF. Serta menurunnya angka pengangguran diiringi meningkatnya pendapatan negara. Dimana, industri minyak dan gas menjadi penyumbang nomor satu setelah persenjataan militer.

Secara militer, Rusia memiliki kemampuan taktis dengan jumlah personil terbesar kedua di dunia setelah Cina. Serta secara politis Rusia memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan PBB sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dengan sering dimintanya dukungan oleh negara lain, contoh: Iran. Lalu yang ketiga Putin dengan sukses mengembalikan Rusia dalam jajaran elit perpolitikan dunia.

Maka tidak salah jika Putin menyatakan "Saudara, Rusia telah kembali, dan itu harus diperhitungkan!"[5] Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin itu memang sederhana, tetapi cukup untuk mengingatkan negara-negara lain agar tidak macam-macam kepada Rusia. Tidak tanggung-tanggung, Putin menyampaikan pernyataan itu di depan para pejabat tinggi Eropa dan Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan AS Roberts Gates, dalam konferensi tahunan mengenai kebijakan keamanan di Muenchen, Jerman, 10 Februari 2007 lalu. Pernyataan ini memiliki arti mendalam karena disampaikan saat Rusia

[4] Artikel, *Perkembangan Industri Migas di Rusia,* Selasa, 02 Maret 2004.

menemukan kembali kepercayaan dirinya sebagai kekuatan utama dunia. Karena itu, pernyataan tersebut menyentak banyak pihak, terutama pihak Barat. Tidak hanya memberi peringatan, Putin secara langsung mengkritik Amerika Serikat, mantan seteru utamanya ketika Rusia masih berupa Uni Soviet. Menurut Putin, Amerika Serikat merupakan kekuatan yang membuat dunia menjadi lebih berbahaya akibat kebijakan perangnya.

Putin juga menuduh Amerika Serikat telah secara sengaja mempertontonkan kekuatan di berbagai negara hingga memicu perlombaan senjata di tingkat global. Masih belum cukup, pada Juni 2007, Putin menyebut Amerika Serikat sebagai kekuatan imperialisme yang mencoba mendikte dan memaksakan keinginan kepada negara lain. Itu adalah beberapa pernyataan Putin paling pedas yang disampaikan kepada Amerika Serikat sepanjang tahun 2007. Biasanya, Amerika Serikat menanggapi pernyataan itu dengan nada kecewa atau menuduh balik bahwa Rusia semakin jauh dari jalan demokrasi. Situasi ini, seperti perang kata-kata pada era Perang Dingin. Selain menyerang Barat dengan retorika tajam, Rusia juga berani menekan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menyeimbangkan kekuatan militernya. Hingga pada Juli 2007, Putin mengancam akan menarik diri dari Pakta Kekuatan Konvensional di Eropa (CFE).[6]

Pembekuan Pakta Pertahanan Konvensional di Eropa secara sepihak oleh Rusia menunjukkan hubungan yang keruh dengan Amerika Serikat. Sekalipun era Perang Dingin semakin jauh ditinggalkan, hubungan Rusia (dulu Uni Soviet) dengan Amerika Serikat sebenarnya masih menyimpan persoalan. Pada

[6] http://www.APIndonesia.com.Rusia Ancam Keluar Dari Pakta Snjata Konvensional Eropa (CFE).Rabu, 12 Desember 2007 diakses 15 Oktober 2008

permukaan hubungan kelihatan baik-baik saja, tetapi pada lapisan yang lebih dalam masih mengandung sensitivitas yang mudah memancing ketegangan. Kasus pembekuan Pakta Kekuatan Konvensional di Eropa (CFE) oleh Presiden Rusia Vladimir Putin semakin menggambarkan hubungan yang tidak mulus. Pembekuan tidaklah tiba-tiba, tetapi merupakan reaksi atas rencana Amerika Serikat membangun sistem anti rudal di Eropa. Segera kelihatan, Rusia sebagai ahli waris Uni Soviet tidak mau tunduk kepada Amerika Serikat, negara adidaya satu-satunya setelah era Perang Dingin. Atas kepercayaan diri yang masih besar itu pula, Putin terdorong membekukan CFE. Di depan sidang parlemen, Putin menyatakan Rusia membekukan pakta tahun 1990 itu.

Pakta itu sebenarnya sangat strategis bagi Eropa karena bertujuan membatasi penempatan pasukan di negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan di negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa. Namun, Rusia merasa sangat terusik oleh manuver Amerika Serikat, yang dinilai tidak memerhatikan perasaan Rusia sebagai ahli waris Uni Soviet. NATO di bawah dominasi Amerika Serikat telah memperluas keanggotaannya ke negara-negara bekas Pakta Warsawa.

Ketersinggungan dan keprihatinan Rusia bertambah karena Amerika Serikat ingin membangun sistem pertahanan antirudal antara lain di Polandia dan Republik Ceko, yang merupakan sekutu Uni Soviet (kini Rusia) di era Perang Dingin. Pemasangan perisai rudal dinilai untuk menghadapi ancaman Rusia, yang memang masih memiliki ribuan kepala nuklir. Namun, Amerika Serikat menyatakan perisai rudal itu dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan serangan

tampaknya tidak terlalu memuaskan Rusia. Presiden Putin pun membekukan secara sepihak CFE, yang tentu menambah prasangka negatif dan memperkeruh hubungan kedua negara besar itu.

Pakta CFE adalah kesepakatan antara NATO dan negara-negara eks Pakta Warsawa, termasuk Rusia, yang membatasi pengerahan kekuatan militer di kawasan Eropa. Perjanjian itu ditandatangani tahun 1990 dan diperbaiki tahun 1999 untuk pengiriman pasukan ke batas negara tertentu di Eropa dari Pantai Atlantik sampai ke Pergunungan Ural di Rusia yang gunanya untuk mengakhiri Perang Dingin tersebut. Namun, setelah Pakta Warsawa bubar dan NATO dimekarkan keanggotaannya pada tahun 2004 dari 19 negara menjadi 26 negara, sehingga NATO memiliki kelebihan senjata atas negara eks Pakta Warsawa dengan perbandingan tiga banding satu sehingga membuat Rusia merasa terdesak terlebih lagi terancam terhadap keamanan nasionalnya, akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh NATO maupun Amerika Serikat.

Kenyataan inilah yang membuat Rusia berang. Putin menginginkan negosiasi ulang perimbangan senjata dengan NATO. Dan jika NATO menolak negosiasi, Rusia tidak akan segan-segan menarik diri dari CFE. Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Juli 2007 mengumumkan tentang penarikan mundur Rusia dari CFE.[7] Dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 12 Desember 2007 lalu Rusia akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari CFE. Dan akibat dari keputusan ini Rusia dapat dengan bebas memindahkan pasukannya serta penggunaan kembali perangkat keras militernya dalam jumlah

[7] http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=43607, Kanselir Merkel Susui Si Kembar Kaczynski, Rakyat Merdeka, Senin, 13 Agustus 2007, 01:52:18 diakses 20 Januari 2008

yang tak terbatas tanpa harus ada catatan NATO. Pemerintah Rusia beralasa karena negara-negara NATO tidak meratifikasi satu versi yang diubah dala perjanjian itu yang dihasilkan tahun 1999 sehubungan dengan kemerdeka negara-negara yang dulunya dikuasai Moskow.

Ancaman Rusia keluar dari CFE juga dilatarbelakangi rencana Ameri Serikat yang ingin membangun sistem pencegat rudal di Polandia dan Repub Ceko, yang notabene adalah bekas sekutu Uni Soviet dan jaraknya dekat deng Rusia. Rusia menganggap, proyek itu adalah ancaman langsung Amerika Seri terhadap keamanan Rusia. Karena itu, Rusia mengancam akan menempat sejumlah roket di wilayah Kaliningrad, wilayah Rusia yang dekat dengan U Eropa. Tidak berhenti sebatas menekan, Rusia juga mulai memperlihat kekuatan militernya.

Pada bulan Agustus 2007 lalu, Rusia memutuskan menghidupkan kem patroli jarak jauh pesawat pengebom strategis yang telah terhenti sejak 15 ta terakhir. Kebijakan ini mengingatkan Perang Dingin saat pesawat penge strategis Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet saling terbang jarak jauh u berpatroli dan menjalankan misi pengintaian. Dan pada bulan yang sama, R mengadakan latihan perang darat dan udara bersama Cina di Pro Chelyabinsk, Rusia. Serta pada September 2007, Rusia berhasil menguji bom non-nuklir berdaya ledak terhebat dalam sejarah yang dijatuhkan pesawat. Bom yang disebut "ayah semua bom" itu berisi 7 ton bahan be ledak tinggi dengan kekuatan ledak setara 44 ton TNT. Bandingkan bom mili yang dijuluki "ibu segala bom". Bom tersebut berisi 8 ton bahan berdaya

bom" yang dilaporkan televisi Rusia sebagai sebuah kampanye.

D. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka muncul suatu pokok masalah yaitu : **Apakah pengaruh Rusia keluar dari CFE pasca ratifikasi tahun 1999 terhadap Stabilitas Keamanan Eropa ?**

E. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan :

Kerangka dasar penulisan ini bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep dalam menyusun hipotesa. Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan di atas, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang berkaitan erat dengan judul ini yaitu:

Teori Persepsi

Teori persepsi (perception theory) untuk menjawab serta menganalisa pokok permasalahan yang muncul. Menurut teori persepsi, bahwa image atau citra sebenarnya hanya merupakan ilusi belaka. Kebenaran tentang suatu hal itu hanya dirumuskan oleh pembuat keputusan saja. Persepsi dalam hubungan internasional memainkan peran dalam menentukan perilaku sebuah negara. Suatu negara melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat. Tanggapan tentang situasi yang ada tergantung kepada bagaimana ia mendefinisikan situasi tersebut. Selain itu menurut teori persepsi [8], manusia atau sekelompok manusia mengambil, memutuskan, dan melakukan suatu tindakan berdasarkan pada apa yang mereka ketahui. Teori persepsi berangkat dari asumsi dasar bahwa tingkah laku seseorang akan dipengaruhi dengan cara ia memandang dan menilai kedudukannya sendiri

[8] Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta

dalam lingkungannya tersebut. Oleh R. Holsti mengemukakan definisi persepsi yang diasumsikan sebagai berikut :

> "Perilaku suatu negara tergantung pada cara pandang negara itu terhadap obyek atau situasi. Persepsi ini selain mengandung nilai-nilai standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya, apakah situasi itu baik atau buruk,merupakan ancaman atau bukan dan lain-lain, juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar, meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya."[9]

Dalam pengertian bebas persepsi diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memandang orang lain didasarkan oleh pengetahuan dan informasi serta fakta-fakta yang dimiliki seseorang. Menurut Thomas Frank dan Eduard Weisland, persepsi merupakan cara pandang dua negara yang saling "melihat", satu sama lain dan sering kali menentukan cara mereka berinteraksi.[10] Persepsi yang mengandung nilai-nilai subyektif dalam membaca fenomena atau kejadian yang ada, banyak mewarnai perilaku negara-negara dalam setiap interaksinya. Ketidakstabilan dan ketidakharmonisan, baik dalam skala global maupun regional yang berakhir dengan konflik diantara kedua negara karena kesalahan persepsi ataupun perbedaan persepsi dari masing-masing negara.

Persepsi Rusia terhadap Amerika Serikat (NATO) sebagai sebuah ancaman atau musuh menyebabkan Rusia khawatir terhadap rencana peningkatan power di pihak Amerika Serikat beserta sekutunya dalam hal ini NATO yang mengisyaratkan akan terjadinya perang dingin baru. Menurut Kenneth E. Boulding, dimensi image *hostility-friendliness* (*permusuhan-pertemanan*) berpengaruh kepada sikap suatu negara kepada negara lain, tergantung dari

---

[9] Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas Study Social UGM, Yogyakarta, 1990, hal 185

[10] Mochtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta

gambaran, citra, atau image dari negara tersebut kepada negara lainnya. Munculnya image, antara lain disebabkan sejarah hubungan permusuhan atau pertemanan kedua negara. [11] Kedua negara pernah terlibat dalam sejarah persaingan di mana Amerika Serikat dan Rusia (tergabung di dalam Uni Soviet) merupakan dua kekuatan utama yang saling bertentangan.

Di bidang keamanan dan pertahanan Amerikat Serikat dan Rusia saling mengantisipasi kemungkinan serangan dari pihak lain. Pengalaman sejarah sebagai musuh tersebut belum lama berakhir, sehingga gejala Amerika Serikat yang ingin meningkatkan kekuatannya masih dianggap Rusia sebagai usaha Amerika Serikat yang mengancam keamanan Rusia. Karena adanya image bahwa Amerika Serikat adalah ancaman atau musuh, maka Rusia harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan keberadaan, otonomi, serta kepentingannya.

Untuk melindungi keberadaannya dan mempersiapkan diri terhadap bahaya yang bisa timbul seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti rencana Amerika Serikat membangun dan mengoperasikan pangkalan perisai tameng anti rudalnya, maka Rusia harus meningkatkan kekuatan persenjataan serta kekuatan militernya. Dalam teori perimbangan kekuasaan menurut Morgenthou, alat utama bagi suatu bangsa dalam alasannya menggunakan kekuatan yang dikuasainya untuk mempertahankan atau memulihkan perimbangan kekuasaan adalah persenjataan.[12] Selain itu, disebabkan image, citra, atau persepsi bahwa Amerika Serikat adalah musuh maka Rusia merasa khawatir

---

[11] Kenneth E. Boulding, "*National Images and International System*",dalam Wolfram F. Hanrieder.Ed., *Comparative Foreign Policy*, David Mc Kay Company. Inc., New York. 1971, hal 93-94

[12] Hans J. Morgenthou, *Politik Antar Bangsa*, di revisi oleh : Kenneth W. Thompson, terjemahan oleh A.M Fatwa, Buku Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , 1991, hal 21

bahwa peningkatan power oleh Amerika Serikat dapat membahayakan keamar nasionalnya. Untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan ya membahayakan di bidang keamanan, maka Rusia dituntut untuk meningkatl kekuatan militer atau artinya melakukan perlombaan senjata dengan Amer Serikat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan konsep Balanc Power dalam hubungan internasional dapat diungkapkan dalam ber *terminology* kesetaraan *power*, artinya masing-masing negara yang mem kekuatan setara dalam situasi *equilibrium*[13], atau salah satu negara dalam kon ini memiliki *power* (sementara) yang lebih besar dibanding negara yang lainn Kecenderungan "arm race" yang terjadi di Uni Eropa pasca disebabkan upaya-upaya pengembangan kekuatan militer diantara negara-negara dikaw tersebut. Masing-masing negara berupaya mengimbangi kekuatan negara- ne lain demi keamanan negaranya. itulah sebabnya mengapa perimbangan kek menjadi perlu dibicarakan. Menurut Morgenthau, *Balance of Power* adalah keadaan nyata, dimana kekuasaan terbagi kurang lebih sama diantara beb banyak negara.[15]

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Mohtar Mas'oed, mengatakan Balance of Power :

> "sebagai suatu equilibrium dimana variabel – variable utamanya l erat, sehingga perubahan di satu variable pasti akan menimb perubahan di variable lain."[16]

---

[13] Jack C Palno dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra Abardin 1999, hal 1
[14] Ibid, hal 1
[15] Hans J. Morgenthou, *Politik Antar Bangsa*, Penterjemah A.M Fatwa, Cetakan 1, Jakarta

Dengan kata lain, dalam kedua pandangan ini suatu negara secara otomatis akan menyesuaikan diri kalau ada peningkatan kekuatan pada negara lain dalam sistem itu dengan cara meningkatkan sumber-sumber kekuatan mereka sendiri.[17] pendekatan ini juga berasumsi bahwa selama masih ada distribusi sumber daya yang cukup seimbang diantara lima atau lebih aktor, kebijaksanaan mereka akan tetap moderat dan upaya oleh satu aktor untuk memperoleh posisi hegemoni akan bisa digagalkan oleh kekuatan pengimbangannya.

Ahli sejarah Arnold Toynbee berpendapat bahwa:

> "*Balance of Power* bekerja untuk menjaga agar kaliber rata-rata negara-negara tetap rendah dalam setiap kriteria pengukur kekuatan politik .... suatu negara yang mencoba meningkatkan kalibernya diatas kaliber rata-rata yang berlaku, secara hampir otomatis, akan menjadi sasaran tekanan dari semua negara-negara anggota konstelasi politik yang sama".[18]

Model Balance of Power sebagai equilibrium ini memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, pada kenyataannya penyesuaian kekuatan itu tidak berjalan otomatis, tetapi tergantung pada kemampuan para negarawan untuk melihat dan menafsirkan perubahan secara tepat. *Kedua*, dalam kasus-kasus spesifik sangat sulit mengetahui apakah perubahan- perubahan dalam sumber daya itu betul-betul meningkatkan atau mengurangi pengaruh satu aktor. *Ketiga*, model ini tidak memperhitungkan tujuan dan motivasi negara-negara tersebut, karena tidak semua negara menggunakan pengaruhnya untuk terus melakukan ekspansi atau agresi, tetapi hanya melakukan sedikit peningkatan sumber daya dan kekuatan demi memperoleh pengaruh dalam politik internasional.

---

[17] Ibid, hal 136

[18] [illegible] E. Hoskins & Richard W. Mansbach, *Structure and Process In International*

Untuk menciptakan perdamaian dan keamanan serta mencegah munculnya kekuatan hegemoni baru dikawasan Uni Eropa, masing-masing negara dikawasan ini secara otomatis menyesuaikan diri dengan cara meningkatkan sumber-sumber kekuatan mereka, yaitu melalui pengembangan kekuatan militer, disamping kekuatan ekonomi. Dalam hal ini Rusia berusaha melakukan pengembangan kembali kekuatan militernya untuk mengimbangi peningkatan kekuatan militer yang dilakukan negara-negara tetangganya di Uni Eropa termasuk Eropa Timur, seperti Polandia, Georgia, Ukraina, serta Cekoslovakia dan lain-lain, yang pada saat pasca Perang Dingin ini semakin menunjukkan kecenderungan "arm race".

Pemekaran anggota yang dilakukan oleh NATO terhadap negara-negara eks-Pakta Warsawa juga telah membuat Rusia berang. Hal ini dikarenakan Rusia merasa terancam terhadap keamanan nasionalnya akibat dari tindakan NATO yang memperluas anggotanya termasuk terhadap negara-negara eks-Pakta Warsawa yang dulu merupakan bagian serta sekutu dari Uni Soviet. Dan perluasan keanggotaan ini hingga ke negara yang berbatasan langsung dengan Rusia seperti Polandia, Republik Ceko, hingga Georgia. Yang berakibat pada rencana Amerika Serikat untuk menggelar perisai tameng anti rudal atau pangkalan sistem pertahanan rudal yang akan ditempatkan di Cekoslovakia serta Polandia sebagai sebuah bentuk payung perlindungan terhadap negara-negara anggota NATO, sebagai bentuk langkah antisipasi adanya ancaman serangan dari Iran, yang menurut Rusia merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia karena kedua negara tersebut berada persis didepan pintu gerbang Rusia. Jadi rencana pembangunan sistem perisai tameng anti rudal atau pangkalan

untuk meningkatkan kemampuan militer agar memiliki power atau kemampuan untuk mengendalikan negara lain. Jika Amerika Serikat membangun dan mengoperasikan pangkalan perisai tameng anti rudalnya, maka ia akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengendalikan pikiran dan tindakan suatu negara, termasuk Rusia.

Terlebih lagi ketika, Georgia berkeinginan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) serta menawarkan diri untuk menggantikan Polandia perihal rencana Amerika Serikat tersebut. Selain itu, NATO juga dinilai telah melewati batas penggelaran kekuatan seperti yang ditetapkan Traktat CFE untuk tank misalnya, NATO sudah menggelar hampir 6.000, untuk pesawat tempur hampir 1.500, dan untuk helikopter penyerang lebih dari 500.[19]

Walaupun Rusia sebagai pewaris tunggal Uni Soviet, yang merupakan mantan negara *superpower* saat ini mulai bangkit dari keterpurukannya pasca pemerintahan Boris Yeltsin. Namun, upaya Rusia ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memperoleh posisi hegemoni regional, akan tetapi hanya untuk mengimbangi kekuatan agar tercipta suatu keadaan nyata dimana kekuasaan terbagi kurang lebih sama, sehingga akan tercipta kestabilan dan keamanan di kawasan Eropa yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keamanan dan kelancaran kepentingan Rusia secara menyeluruh. Dengan demikian, konteks internasional dan situasi dalam negeri Rusia tersebut yang telah menjadi bahan pertimbangan Rusia dalam pengambilan kebijakan luar negeri untuk keluar dari CFE di tahun 2007 pasca diratifikasi pada tahun 1999.

[19] http://kompas.com/kompas-cetak/0711/09/opini/3979652.htm, Langkah Rusia dan Traktat CFE, diakses pada 24 Febuari 2008

F. Hipotesa

Dengan menurut pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka hipotesa yang dirumuskan dalam penulisan ini disebabkan oleh:

1. Akibat keluarnya Rusia dari traktat CFE, perimbangan kekuatan militer di Eropa akan menjadi tidak stabil karena adanya perlombaan senjata

G. Jangkauan penelitian

Untuk mempermudah melaksanakan analisa, penelitian ini mengkaji motivasi pemerintahan Presiden Vladimir Putin dalam pembentukan CFE, maka penulis memberikan batasan jangkauan dalam penulisan ini..

Pembatasan waktu dimulai dari tahun 1999 adalah tahun dimana pada masa tersebut Rusia menjadi lebih terbuka dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya terhadap dunia internasional khususnya dalam kerjasama kelanjutan dari CFE yang diratifikasi pada tahun yang sama hingga tahun 2007 dimana Presiden Vladimir Putin memutuskan untuk keluar dari kerjasama CFE tersebut.

H. Metode Pengumpulan data

Dalam memperoleh data guna memahami serta menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Beberapa sumber yang digunakan adalah berasal dari: buku-buku, website, surat kabar, dan majalah serta artikel. Dari beberapa sumber itulah penulis dapat mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan permasalahan ini.

I.Sistematika Penulisan

Bab 1, Merupakan pertanggungjawaban metodologis penulisan in meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar b masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, h jangkauan penelitian, metode pengumpulan data da sistematika penulisan.

Bab 2, Menjelaskan tentang proses awal terbentuknya Rusia sebaga kekuatan di Eropa dimulai ketika Rusia belum bergabun pemerintahan Uni Soviet hingga menjadi sebuah negara bag paling berpengaruh di Uni Soviet sampai pada akhirnya U bubar dan digantikan oleh Federasi Rusia sebagai pewarisny

Bab 3, Dalam bab ini penulis hendak menceritakan tentang perke hubungan Rusia dan NATO pasca Perang Dingin yang lebi khususnya dalam pembentukan CFE .

Bab 4, Menjelaskan mengenai dampak dari keputusan Pemerin khususnya pada masa kepemimpinan Vladimir Putin unt dari CFE

Bab 5, Merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penulisar mana merupakan rangkuman dari uraian dan pembahasan bab sebelumnya. Serta pembuktian hipotesa yang disebu